

**Pengelolaan PAUD Holistik Integratif Berbasis Kemitraan
Dengan Menggunakan Pendekatan Metakognisi**

Fransiskus De Gomes

Jurusan Pendidikan Guru PAUD, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
Ruteng, Indonesia.

Email: diodinhon@gmail.com

Abstrak

Layanan PAUD seyogyanya menyentuh dan menjawab semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik dan terintegrasi. Kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harus dipenuhi adalah pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Pelaksanaan layanan-layanan ini membutuhkan pengelolaan kelembagaan PAUD secara matang. Pengelolaan PAUD secara holistik dan terintegrasi membutuhkan kerja sama para pemangku kepentingan. Melalui kemitraan, Satuan PAUD HI dapat menyusun perencanaan, mengorganisasikan sumber daya, melaksanakan program kegiatan, pengawasan dan evaluasi secara efektif, efisien, dan kredibel. Pengelolaan PAUD HI selayaknya berbasis konteks lokal lembaga itu sendiri. Analisis pengelolaannya harus matang dan tidak terjebak pada pola pikir dan pola kerja imitatif dan rutinitatif. Artikel ini memberikan alternatif pengelolaan PAUD secara holistik dan terintegrasi dengan pola kemitraan dan pendekatan metakognisi.

Kata kunci: PAUD, pengelolaan, holistik, integrasi, kemitraan, pendekatan metakognitif.

***Management of Partnership Based Holistic Integrative of
Early Childhood Education by Using a Metacognition Approach***

Abstract

Early Childhood Education should stimulate all the needs of children's growth and development in a holistic and integrated manner. The needs for growth and development of children that must be met are education, health, nutrition, care, care, protection, and welfare. The implementation of these services requires careful institutional management of early childhood education. Holistic and integrated of early childhood education management requires the cooperation of stakeholders. Through partnerships, holistic and integrated of early childhood education units can plan, organize resources, carry out program activities, monitor and evaluate effectively, efficiently and credibly. Management of holistic and integrated of early childhood education should be based on the local context of the institution itself. Management analysis must be mature and not trapped in imitative and routine mindsets and work patterns. This article provides an alternative to early childhood education management in a holistic and integrated manner with a partnership pattern and a metacognition approach.

Keywords: *early childhood education; management; holistic; integration: partnership; metacognition approach.*

PENDAHULUAN

Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus bertambah dari tahun ke tahun sejak pemerintah pusat mencanangkan PAUD sebagai salah satu program pokok nasional untuk meningkatkan pembangunan pendidikan pada tahun 2004. Kemendikbud pada Desember 2020 merilis 205.472 lembaga PAUD yang tersebar di 34 Provinsi. Jumlah ini meningkat di tahun 2021. Pada tahun 2021, jumlah lembaga PAUD adalah sebesar 238.008. Provinsi NTT memiliki 5821 lembaga yang terdiri atas TK/RA sebanyak 1.761, Kelompok Bermain (KB) sebanyak 3.708, Tempat Penitipan Anak (TPA) ada 24 lembaga, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebanyak 328. Kabupaten Manggarai mempunyai 308 lembaga PAUD. Peningkatan secara kuantitatif lembaga PAUD ini tidak sejalan peningkatan kualitasnya. Indikator nasional kualitas penyelenggaraan PAUD dapat dilihat pada hasil akreditasinya. BAN PAUD dan PNF per tanggal 06 Maret 2022 mengupdate data akreditasi PAUD sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni ada 4.757 tahun 2015, 9.631 tahun 2016, 10.913 tahun 2017, 28.476 tahun 2018, dan 37.094 tahun 2019 (BAN PAUD PNF, 2019). Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak lembaga PAUD yang belum terakreditasi sebab populasi lembaga PAUD jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah lembaga yang telah terakreditasi. Hal ini merupakan masalah yang perlu diperhatikan secara serius.

Jika mencermati realitas penyelenggaraan PAUD secara nasional tercatat sejumlah persoalan umum yang menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitasnya. Ketua Umum Himpunan Pendidik PAUD seluruh Indonesia (Himpaudi), Netti Herawati (Aji, 2016) mengidentifikasi

beberapa masalah yang dihadapi PAUD. Pertama, kualifikasi akademik guru PAUD di mana hanya 23,06 persen berpendidikan strata-1 (S1), sementara Standar Nasional Pendidikan menetapkan guru PAUD baik formal maupun non formal minimal S1 PAUD, psikologi, atau kependidikan. Kedua, persoalan kualitas program dan lembaga PAUD. Ketiga, masih sepertiga anak usia 3-6 tahun yang belum mendapat layanan PAUD. Keempat, keterlibatan keluarga yang belum maksimal padahal penyelenggaraan PAUD membutuhkan kerja sama dengan berbagai stakeholder termasuk orang tua anak. Kelima, proses pembelajaran lebih berfokus pada baca-tulis-hitung (calistung) yang bernuansa akademik padahal pembelajaran di PAUD seharusnya 80% membangun sikap. Masalah lainnya adalah minimnya sarana dan prasarana, serta masalah kesejahteraan guru.

Pada konteks lokal Kabupaten Manggarai Propinsi NTT juga menemukan masalah serupa. Hasil penelitian evaluasi yang dilakukan oleh De Gomes, Rahmat, dan Palmin menunjukkan bahwa penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak terkategori kurang baik dengan skor 29,01%. Ada 11 indikator yang dievaluasi dalam penelitian ini, yakni: (1) izin operasional dan syarat pendirian lembaga sebesar 46,11% atau terkategori cukup baik, (2) persyaratan prasarana dan sarana sebesar 25,24% atau terkategori kurang memadai, (3) kurikulum sebesar 26,81% atau terkategori kurang baik, (4) tenaga pendidik dan kependidikan sebesar 16,99% atau terkategori kurang memadai, (5) manajemen administrasi siswa, kepegawaian, keuangan, dan umum sebesar 29,86% atau terkategori

kurang baik, (6) manajemen pembiayaan sebesar 29,52% atau terkategori kurang baik, (7) kemitraan sebesar 7,31% atau terkategori tidak baik, (8) manajemen evaluasi dan pengembangan lembaga sebesar 4,15% atau terkategori tidak baik, (9) penerapan prinsip-prinsip pendidikan bagi anak usia dini sebesar 33,01% atau terkategori kurang baik, (10) deteksi tumbuh kembang anak sebesar 0,12% atau terkategori tidak baik, dan (11) prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD sebesar 100% atau terkategori sangat baik (F De Gomes, 2019).

Data Kemendikbud periode tahun 2019/2020 menunjukkan bahwa ada 52.687 Satuan PAUD yang telah mengimplemtasikan layanan holistic integratif dan dilakukan pada 50 Kabupaten/Kota di Indonesia (Supanji, 2021). Data ini menginformasikan bahwa layanan PAUD di Indonesia masih bersifat parsial dan berjalan sendiri tanpa kolaborasi dengan banyak stakeholder. Kondisi inilah yang mengakibatkan efektivitas capaian layanan PAUD belum tampak secara signifikan.

Beberapa kelemahan dari aspek pengelolaan kelembagaan lembaga PAUD, yakni kualitas pengelolaan yang belum profesional, keterbatasan jumlah lembaga penyelenggara PAUD terutama di wilayah pelosok, distribusi dan kualitas tenaga pendidik yang belum proporsional dan masih rendah, fasilitas pelayanan yang kurang memadai, pemahaman para pemangku kepentingan baik pengambil kebijakan, penyelenggara, maupun masyarakat akan pentingnya pengembangan anak usia dini yang holistik integratif juga masih terbatas (Anam, 2021). Problematika penyelenggaraan PAUD seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan

lembaga PAUD masih menjadi poin penting untuk dibenahi. Pada tataran ini, pengelolaan mencakup delapan standar penyelenggaraan PAUD yang mencakup Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA), standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan PAUD holistik integratif membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Dalam konteks ini pola kerja kemitraan yang proporsional menjadi satu tawaran yang perlu dilakukan secara baik. Pola kerja kemitraan yang demikian harus didukung dengan pola berpikir metakognitif sehingga tidak terjebak dalam cara kerja rutinitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PAUD HI BERBASIS KEMITRAAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN METAKOGNISI

Konsep pengelolaan PAUD HI yang ditawarkan dalam artikel sederhana ini menekankan model kemitraan dengan menggunakan pendekatan metakognisi. Untuk menguraikan konsep ini secara rinci maka alur argumentasinya adalah: (1) Layanan PAUD Holistik Integratif, (2) Kemitraan dalam PAUD HI, (3) Pendekatan Metakognisi, dan (4) Penggunaan Pendekatan Metakognisi dalam Layanan PAUD HI Berbasis Kemitraan.

Layanan PAUD Holistik Integratif

Layanan PAUD seyogyanya menyentuh dan menjawab semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik biologis, psikologis maupun secara legal-sosial. Secara fisik-biologis, kebutuhan anak berkaitan dengan

asupan gizi seimbang. Kebutuhan secara psikologis berkaitan pemenuhan hak anak akan pengasuhan dan pendidikan secara baik. Sedangkan kebutuhan legal sosial berkenaan dengan hak anak atas identitas legal formil dan jaminan atas perlindungan dirinya dari berbagai bentuk kekerasan. Gagasan ini mengafirmasi keharusan layanan holistik integratif dalam penyelenggaraan PAUD.

Pemerintah menyadari bahwa layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) merupakan tuntutan yang harus dipenuhi bagi pemenuhan hak anak secara holistik. Oleh sebab itu, Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 menegaskan bahwa pengembangan anak usia dini holistik-integratif merupakan usaha pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah terciptanya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Tujuan khususnya adalah: pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar anak usia dini secara utuh yang mencakup kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur. Kedua, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada. Ketiga, terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah. Keempat, terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu

orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan anak usia dini secara holistik-integratif.

Untuk mencapai tujuan PAUD HI, ada sejumlah prinsip yang mendasari penyelenggaraan program pengembangan anak usia dini secara holistik integratif, yakni pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi; pelayanan yang berkesinambungan; pelayanan yang non diskriminasi; pelayanan yang tersedia, dapat terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat; partisipasi masyarakat; berbasis budaya yang konstruktif; dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran pengembangan anak usia dini secara holistik integratif adalah: (1) masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini; (2) kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis; (3) penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan; (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan; media massa; dan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Berdasarkan uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa makna holistik integratif dalam layanan PAUD adalah: pertama, upaya memenuhi semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak secara komprehensif baik secara fisik-biologis, pengasuhan dan pendidikan maupun kebutuhan legal sosial. Kedua, upaya membangun integrasi kemitraan berbagai stakeholder dengan menggunakan strategi-strategi yang tepat untuk

menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak usia dini.

Kemitraan dalam PAUD HI

Dalam uraian sebelumnya ditegaskan bahwa holistik integratif pada tataran penyelenggara PAUD mempunyai makna kemitraan. Dalam tulisan ini, kemitraan dimaknai dengan jalinan kerjasama berbagai komponen dengan semangat kepedulian dan sinergitas untuk mencapai satu tujuan bersama, yakni terciptanya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

Berbagai komponen yang seyogyanya membangun kemitraan layanan PAUD antara lain orangtua (keluarga), sekolah, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat. Masing-masing pihak mendapatkan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Secara umum, tugas pokok masing-masing *stakeholder* ini adalah: Pertama, keluarga dengan aktor utama adalah orang tua. Tugas pokok orang tua adalah menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan dan mendorong perkembangan budaya prestasi anak, menjalin interaksi dan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang dengan anak, memberikan motivasi dan menanamkan rasa percaya diri pada anak, menjalin hubungan dan komunikasi yang aktif dengan pihak satuan PAUD untuk memberikan informasi tentang perkembangan anak, mendukung semua program sekolah dengan cara menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak dan menyelaraskan kegiatan anak di rumah dengan kegiatan di sekolahnya, bersikap proaktif untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan anak dari guru, terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan orang tua yang diprogramkan oleh sekolah serta

terlibat dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh sekolah.

Kedua, satuan PAUD dengan aktor utama pengelola, kepala sekolah dan para guru. Sebagai penyelenggara PAUD, tugas pokok yang harus dilakukan oleh pengelola dan kepala sekolah adalah melakukan analisis kebutuhan, membangun kemitraan dan mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing mitra kerja sama, bersama mitra menyusun program kerja untuk pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan PAUD termasuk penyediaan sarana dan prasarana, mengembangkan kurikulum kontekstual, melakukan supervisi dan evaluasi program lembaga PAUD. Sementara tugas guru PAUD adalah menyiapkan perangkat pembelajaran, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran serta membuat pelaporan untuk disampaikan kepada pengelola, kepala sekolah, dan orang tua siswa.

Ketiga, pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah pusat adalah menyediakan regulasi yang jelas dan terukur serta memberikan stimulasi pendampingan melalui pembiayaan yang proporsional dan mengontrol kualitas penyelenggaraan PAUD HI melalui mekanisme money seperti akreditasi. Peran strategis pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD HI ada pada Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ada sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan PAUD HI, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, dan lain-lain. Masing-masing Dinas tersebut memiliki tugas dan tanggung

jawab dalam penyelenggaraan PAUD HI. Tugas dan tanggung jawab Dinas-Dinas tersebut berkaitan dengan lima indikator layanan PAUD HI, yakni layanan pendidikan, layanan kesehatan, gizi dan perawatan, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, dan layanan kesejahteraan. Dinas Pendidikan memiliki tugas yaitu memastikan layanan pendidikan bagi anak usia dini berjalan dengan jelas, terkontrol, dan terukur melalui manajemen kerja yang profesional. Dinas Kesehatan bertugas memberikan layanan kesehatan dan gizi kepada ibu hamil dan anak PAUD. Layanan kesehatan yang dimaksud antara lain posyandu sebagai upaya untuk mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak, pemberian makanan sehat bergizi seimbang, layanan pencerahan dan praktik pengasuhan anak, serta membekali keterampilan orangtua dalam mengatasi masalah kesehatan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam memastikan adanya jaminan perlindungan anak dari tindakan kekerasan. Dinas Catatan Sipil mempunyai peran dalam memberikan salah satu hak dasar anak yakni hak identitas melalui ketersediaan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak. Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah memperluas akses PAUD dan mengontrol proses penyelenggaraan PAUD dalam kerja sama dengan Pemerintah Desa. Peran Dinas Sosial adalah memberikan jaminan sosial akan kesejahteraan bagi keluarga/orang tua anak. Jika masing-masing Dinas ini diberi tugas dan tanggung jawab yang jelas maka kecenderungan *ego sector* akan terhindarkan. Yang ada hanya pola kerja kolaboratif.

Keempat, masyarakat. Komponen masyarakat yang memiliki potensi dalam menyelenggarakan PAUD HI antara lain akademisi, praktisi PAUD, LSM terutama yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat/keluarga dan anak, pelaku dunia usaha industri, dan pranata sosial lainnya seperti agama dan adat. Bentuk keterlibatan masyarakat tampak dalam bentuk memberikan gagasan konstruktif dan bantuan materil bagi pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD (Sri Wahyuni, 2019) (Wahyuni, 2019). Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat maka pengelola/kepala PAUD melakukan identifikasi potensi masyarakat, membuat forum kerja sama, dan serta mendistribusikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Jika masing-masing *stakeholder* diberi tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam bingkai kemitraan maka penyelenggaraan layanan PAUD HI pasti dapat berjalan dengan baik. Pada tataran ini, peran kunci ada di tangan lembaga PAUD itu sendiri terutama dalam diri pengelola dan kepala sekolah. Pengelola dan kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni terutama dalam mengelola kerja sama baik dengan keluarga/orangtua siswa, pemerintah, maupun masyarakat. Jika pengelola dan kepala sekolah tidak memiliki kemampuan mengelola kerja sama dengan baik maka sulit untuk mewujudkan layanan PAUD HI.

Pendekatan Metakognisi

Konsep metakognisi (*metacognition*) pertama kali diperkenalkan oleh John Flavell pada tahun 1979. Metakognisi terdiri dari kata 'meta' dan 'kognisi'. Meta berarti 'sesudah, melampau' dan kognisi berarti kegiatan/proses untuk

mendapatkan pengetahuan, kesadaran, dan keyakinan. Secara etimologis, metakognisi berarti proses yang melampaui upaya untuk mendapatkan pengetahuan, kesadaran, dan keyakinan. Metakognisi diartikan *thinking about thinking* atau pengetahuan seseorang tentang proses berpikirnya (Flavell, 1979). Dalam definisi ini, obyek berpikirnya adalah proses berpikir itu sendiri. Definisi lain tentang metakognisi adalah proses di mana seseorang berpikir tentang berpikir dalam rangka membangun strategi untuk memecahkan masalah (O'Neil, 1997). Dalam konsep ini, tujuan metakognisi adalah membangun strategi kognitif untuk memecahkan masalah. Pada tataran ini, strategi kognitif dimaknai sebagai kemampuan internal seseorang yang terorganisir untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan.

Metakognisi merupakan proses berpikir yang levelnya melebihi berpikir itu sendiri. Wellman menyatakan bahwa metakognisi merupakan suatu bentuk proses berpikir dua tingkat atau lebih yang melibatkan pengendalian terhadap aktivitas kognitif (Usman Mulbar, 2021). Konsep berpikir yang demikian mengafirmasi originalitas proses berpikir sehingga pemikir dapat mengorganisasikan dan mengontrol seluruh proses berpikir yang dilakukannya dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Flavell (1979), ada dua komponen metakognisi, yaitu: pengetahuan metakognitif (*metacognitive knowledge*) dan pengalaman metakognitif (*metacognitive experiences*) (Flavell, 1979). Pertama, pengetahuan metakognitif (*metacognitive knowledge*). Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan yang diperoleh tentang proses-proses kognitif yaitu

pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengontrol proses kognitif. Pengetahuan metakognisi juga diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang dan tersimpan di dalam memori jangka panjang yang dapat diaktifkan kembali (*recall*) sebagai hasil dari suatu pencarian memori yang dilakukan secara sadar dan disengaja, atau diaktifkan tanpa disengaja atau secara otomatis muncul ketika seseorang dihadapkan pada permasalahan tertentu.

Pengetahuan metakognisi terdiri atas tiga jenis, yaitu: pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional. Pengetahuan deklaratif mengacu kepada pengetahuan tentang fakta dan konsep-konsep yang dimiliki seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran dan perhatiannya dalam memecahkan masalah. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana menerapkan langkah-langkah atau strategi-strategi dalam suatu proses pemecahan masalah. Pengetahuan kondisional berkaitan dengan kesadaran seseorang akan kondisi yang mempengaruhi dirinya dalam memecahkan masalah, yaitu: kapan suatu strategi seharusnya diterapkan, mengapa menerapkan suatu strategi dan kapan strategi tersebut digunakan dalam memecahkan masalah.

Kedua, pengalaman metakognitif (*metacognitive experiences*). Pengalaman atau regulasi metakognisi adalah pengaturan kognisi dan pengalaman belajar seseorang yang mencakup serangkaian aktivitas yang dapat membantu dalam mengontrol kegiatan belajarnya. Pengalaman-pengalaman metakognisi melibatkan strategi-strategi metakognisi atau pengaturan metakognisi. Strategi-

strategi metakognisi merupakan proses-proses yang berurutan yang digunakan untuk mengontrol aktivitas-aktivitas kognitif dan memastikan bahwa tujuan kognitif telah dicapai.

Pengalaman metakognitif terdiri atas tiga proses, yaitu: perencanaan proses, proses pemantauan, dan proses evaluasi. Proses perencanaan merupakan keputusan tentang berapa banyak waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, strategi apa yang akan dipakai, sumber apa yang perlu dikumpulkan, bagaimana memulainya, dan mana yang harus diikuti atau tidak dilaksanakan lebih dahulu. Proses pemantauan merupakan kesadaran langsung tentang bagaimana kita melakukan suatu aktivitas kognitif. Proses pemantauan membutuhkan pertanyaan seperti 'apakah hal ini memberikan arti?', 'dapatkah saya melakukannya lebih cepat?' dan lain-lain. Proses evaluasi memuat pengambilan keputusan tentang proses yang dihasilkan berdasarkan hasil pemikiran dan pembelajaran. Formulasi pertanyaan untuk membantu proses evaluasi, misalnya, 'dapatkah saya mengubah strategi yang dipakai?', 'apakah saya membutuhkan bantuan?', dan lain-lain.

Dalam artikel ini metakognisi diartikan dengan kemampuan pemikir untuk mengorganisasikan dan mengontrol proses berpikirnya dalam menyelesaikan masalah. Dari dua komponen metakognisi sebagaimana dinyatakan oleh Flavell (1979), artikel ini lebih mengadopsi komponen pengalaman metakognitif dalam membedah masalah pengelolaan PAUD HI. Indikator dari ketiga proses pengalaman metakognitif sebagaimana dinyatakan Swartz dan Perkins (Mehromah, 2013) adalah

pertama, proses perencanaan mencakup: (1) menentukan informasi awal dan petunjuk awal yang berkaitan dengan permasalahan, (2) menentukan/menyusun hal-hal yang harus dilakukan, (3) memperhitungkan waktu yang dibutuhkan, dan (4) memastikan kesesuaian informasi dengan permasalahan. Kedua, indikator proses pemantauan meliputi: (1) mengatur dan memastikan setiap langkah/tahapan berjalan dengan baik, (2) menganalisa informasi yang penting untuk diingat, (3) memutuskan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya apakah perlu terjadi perubahan atau pindah pada petunjuk lain, dan (4) memutuskan langkah yang harus dilakukan jika menemui masalah/hambatan. Ketiga, indikator proses evaluasi antara lain: (1) memeriksa kembali setiap langkah/tahapan kegiatan yang telah dilakukan, (2) memeriksa kembali apakah diperlukan pertimbangan khusus lain dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, (3) memperkirakan kemungkinan cara lain yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan (4) memperkirakan kemungkinan penggunaan strategi yang telah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan lain.

Penggunaan Pendekatan Metakognisi dalam Pengelolaan PAUD HI Berbasis Kemitraan

Kata "pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pengaturan atau pengurusan. Manajemen diartikan dengan pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Berdasarkan makna kata ini maka manajemen diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan

tertentu. Griffin (Moch. Fikriansyah Wicaksono, 2019) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Definisi ini menguraikan komponen manajemen yakni perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian organisasi, keuangan, sumber daya materi dan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks penyelenggaraan PAUD HI, pengelolaan dimaknai dengan proses perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) serta evaluasi (*evaluation*) terhadap pelaksanaan pendidikan secara holistik dan komprehensif untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia secara efektif dan efisien.

Penggunaan pendekatan metakognisi dalam pengelolaan PAUD HI berbasis kemitraan dapat dilakukan melalui tahap-tahap: pertama, perencanaan sebagai tahap awal sekaligus penentu keberhasilan penyelenggaraan PAUD HI. Kegiatan utama pada tahap ini adalah menganalisis kebutuhan (*need assessment*), yakni upaya mengidentifikasi, menghitung, dan menentukan apa saja yang akan dijalankan, tempat, waktu, metode/strategi, sumber daya yang dibutuhkan baik materi maupun

manusia sebagai pelaksana, dan tujuan yang akan dicapai termasuk indikator capaiannya. Pada tataran perencanaan, analisis metakognitif yang dilakukan adalah: (1) mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan PAUD, potensi dan sumberdaya yang tersedia baik materi maupun manusia yang ada pada Satuan PAUD. Permasalahan yang diidentifikasi dan dianalisis mencakup input siswa, kurikulum dan proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian perkembangan anak. (2) Menentukan tujuan dan menyusun strategi pencapaian tujuan. Tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia secara efektif dan efisien. Strategi pencapaiannya adalah kemitraan lintas sektor melalui distribusi tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk melaksanakan layanan holistik integratif yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Selanjutnya menyusun program aktivitas untuk mencapai tujuan. (3) Menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan program aktivitas yang telah ditetapkan dalam bentuk kalender tahunan. (4) Menganalisis kembali kesesuaian antara hasil analisis kebutuhan, potensi, dan sumber daya dengan tujuan dan strategi yang dipilih untuk memastikan kebenaran dan keterjalinan satu dengan yang lain.

Kedua, pelaksanaan dan pengawasan yakni tahap di mana para pelaku melaksanakan dan mengawasi aktualisasi tugas yang diterimanya dengan penuh tanggung jawab. Program kerja yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan

dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya dan menggunakan metode dan strategi yang telah ditetapkan. Analisis metakognitif pada tahap pelaksanaan adalah: (1) mengatur dan memastikan setiap program kerja dijalankan oleh pelaksanaanya secara baik, (2) mencatat tahapan pelaksanaan program sebagai data untuk menilai kualitas proses penyelenggaraan layanan PAUD HI. (3) Menganalisis dan memutuskan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya apabila menemukan masalah atau hambatan dalam melaksanakan program layanan PAUD HI.

Ketiga, evaluasi yakni tahap mengukur dan menilai keberhasilan layanan PAUD HI. Evaluasi yang dilakukan mencakup proses dan hasil. Evaluasi hasil mengacu pada seberapa besar pencapaian tujuan layanan PAUD HI, yakni berkaitan dengan anak usia dini yang berkembang dengan sangat baik. Evaluasi proses meliputi: (1) memeriksa kembali setiap langkah/tahapan kegiatan yang telah dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensinya. (2) Jika dinilai kurang efektif dan efisien maka diperlukan pertimbangan dan penentuan strategi perbaikannya baik yang berkaitan dengan perencanaan maupun pelaksanaan, dan (3) mengkaji dan menentukan strategi-strategi baru yang dinilai efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas prosesnya. Contoh, dalam tahapan pelaksanaan program layanan PAUD HI ditemukan masalah minimnya sumber daya manusia terkait kompetensi guru, maka perlu memutuskan langkah strategis pengembangan kompetensi guru seperti melalui pendidikan dan latihan.

Pengelolaan PAUD HI berbasis kemitraan dengan menggunakan pendekatan metakognisi menuntut peran penting dan sentral Satuan PAUD (pengelola/kepala Sekolah) sebagai penggerak utamanya. Dalam hal ini kompetensi kepemimpinan (*leadership*) dari pengelola/kepala PAUD sangat dibutuhkan. Pengelola/kepala PAUD harus mampu menggerakkan para mitranya agar menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Peran kepemimpinan yang lainnya adalah memastikan semua program kerja dapat terlaksana secara tepat dan terukur.

SIMPULAN

Pengelolaan PAUD seyogyanya berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan sebab ada banyak jenis layanan yang harus diberikan kepada anak, di antaranya pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Semua layanan ini harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Oleh sebab itu, Satuan PAUD melalui peran kepemimpinan pengelola/kepala satuan diharapkan mampu menggerakkan segenap komponen pemangku kepentingan secara proporsional, sebab kemampuan guru PAUD untuk memberikan semua layanan tersebut terbatas.

Pengelolaan PAUD HI berbasis kemitraan membutuhkan kajian yang mendalam agar tidak terjebak dalam pola kerja imitatif. Pada konteks ini, pendekatan metakognitif menjadi suatu alternatif untuk membantu pengelola/kepala satuan dalam mengelola layanan PAUD HI. Pendekatan metakognitif menawarkan cara dan pola kerja *out of the box*. Melalui analisis metakognitif, pengelolaan PAUD yang mencakup perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara akurat sebab setiap tahapan pengelolaan dikontrol melalui prosedur analisis metakognitif yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. (2016). *Himpaudi: 8 Masalah Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Tribunnews.com. Retrieved 3 09, 2022, from <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/10/himpaudi-8-masalah-pendidikan-anak-usia-dini>
- Anam, N. (2021). *Berbagai Problematika Pendidikan Dan Pembelajaran Di Dalam Lembaga Pendidikan Paud Dan Tk/Ra Di Indonesia*. Jember: IAIQ.AC.ID. Retrieved 3 9, 2022, from <https://iaiq.ac.id/tag/paud/>
- BANPAUDPNF. (2019). *Analisis Hasil Akreditasi Satuan Paud Dan Pnf Tahun 2019*. Jakarta: BANPAUDPNF. Retrieved 03 09, 2022, from <https://akreditasi.banpaudpnf.or.id/laporan>
- F De Gomes, S. R. (2019). Evaluasi Penyelenggaraan Kb Dan Tkk Di Kabupaten Manggarai Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Ditjen PAUD. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar (JIPD)*, 3(1), 2.
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906-911. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.34.10.906>
- Mahromah, L. A. (2013). Identifikasi Tingkat Metakognisi Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Berdasarkan Perbedaan Skor Matematika. *MATHEdunesa*, 2(1), tanpa hal. doi:<https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v2n1.p%25p>
- Moch. Fikriansyah Wicaksono, F. R. (2019). Penerapan Konsep Visitor Experience Dalam Upaya Mewujudkan Perpustakaan Digital Di Era Society 5.0. *Bibliotika Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, 114-122. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/bibliotika>
- O'Neil, H. F. (1997). *Differential effects of question formats in math assessment on metacognition and affect (CSE Report 449)*. Los Angeles: University of California, Los Angeles, National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing (CRESST).
- Sri Wahyuni, E. N. (2019). Peningkatan kualitas layanan pos PAUD melalui penyusunan program penguatan Pendidikan karakter berbasis masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 180-190. doi:10.21831/jppm.v6i2.28351
- Supanji, T. H. (2021). *Pemerintah Dorong Peningkatan Implementasi PAUD-HI di 50 Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kemenko PMK. Retrieved 3 9, 2022, from <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-dorong-peningkatan-implementasi-paud-hi-di-50-kabupatenkota>
- Usman Mulbar, A. A. (2021). Metakognisi Siswa SMA dalam Menyelesaikan Masalah Matematika. *Issues in Mathematics Education*, 5(2), 91-99.

doi:<https://doi.org/10.35580/i-med23840>